

Pengaruh Ukuran Koperasi, Jumlah Anggota Dan Jenis Koperasi Terhadap Pelaksanaan Jasa Audit Pada Koperasi

Jilma Dewi Ayu Ningtyas, S.Pd, M.Si
Politeknik Pusmanu
jilmadewi@gmail.com

ABSTRAK

Cooperative is one of the main buffer Indonesia's economy. The development of cooperatives started to increase from year to year. The rapid growth coupled with optimum performance. The performance of an enterprise can be seen from its financial statements. Financial statements provide information that is useful for the users to making economic decisions. Economic decisions are taken based on financial statements that accountable. To meet the accountability of financial statements typically see the audited financial statements. Therefore, financial statements need to be audit. Audit of financial statements in cooperative likely influenced by several factors: size of the cooperative, number of members and type of cooperative. This research is quantitative. The sample used active primary cooperatives in the province of Central Java. Technique sampling used sample area probability sample. Methods of data collection is documentation and data analysis using regression analysis, because they want to know how likely the size of the cooperative, number and type of cooperative members can influence the demand for audit services to the cooperative. The result that size of the cooperative, number of members, and the type of cooperative partially affect the demand for audit services to the cooperative. While simultaneously the variability of the dependent variable (demand for audit services) can be explained by the variability of independent variables (size of the cooperative, number of members, and the type of cooperative) of 54,6% and 45,4% can be explained by factors outside the model.

Keywords : Audit, financial statements, cooperatives, size, number of members, type of cooperative

Pendahuluan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum yang kegiatannya dilandaskan pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012 dan SAK No. 27 Koperasi dapat membantu meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat. Sebagai badan usaha atau pelaku bisnis, koperasi dijadikan sebagai penyangga utama perekonomian di Indonesia. Hal ini karena koperasi memiliki budaya gotong-royong yang sesuai dengan budaya asli Indonesia. Perkembangan koperasi mulai meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan koperasi dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pembangunan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan koperasi semakin meningkat, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015, jumlah koperasi yang aktif di Indonesia sebanyak 150.223 unit tersebar di seluruh Indonesia, dimana terbanyak ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 maka objek penelitian ini difokuskan pada koperasi primer tingkat provinsi yang aktif di Jawa Tengah yang berjumlah 475 unit koperasi. Pemilihan observasi penelitian ini diambil di Jawa Tengah karena struktur koperasi di Jawa Tengah ataupun di daerah lain adalah sama, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini diharapkan bisa mewakili populasi koperasi di seluruh Indonesia.

Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 tercatat bahwa koperasi di Provinsi Jawa Tengah memiliki volume usaha yang besar dengan total volume usaha mencapai 54,11 trilyun dan jumlah anggota juga besar yaitu sebesar 7.808.978 orang. Hal ini membuktikan bahwa koperasi sangat diminati oleh masyarakat. Namun Beberapa koperasi juga disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk merugikan anggota dan masyarakat. Peraturan Menteri No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 yang mewajibkan koperasi simpan pinjam untuk diaudit apabila volume usahanya lebih dari Rp2.500.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). dan Perda Jateng No. 2 tahun 2012, yang meminta kepada seluruh koperasi yang memiliki volume usaha di atas lima milyar (5M) untuk melakukan audit. Pada kenyataan di lapangan koperasi dapat memilih regulasi mana yang akan digunakan sebagai dasar keputusan koperasi melakukan audit atau tidak.

Pada hasil observasi, ada koperasi yang memiliki volume usaha kurang dari 5 M sudah melakukan audit karena koperasi tersebut menggunakan regulasi berdasarkan permen. Selain permen dan perda, penilaian tingkat kesehatan koperasi yang memberikan peringkat tingkat kesehatan koperasi juga menentukan keputusan koperasi akan mengaudit laporan keuangannya atau tidak.

Pedoman pemeringkat koperasi pada bagian penilaian menunjukkan bahwa salah satu dasar penilaian adalah aspek badan usaha aktif yang ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan (RAT), audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Koperasi melakukan audit laporan keuangannya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan pihak ketiga yang ingin menanamkan modalnya kepada koperasi. Sehingga koperasi melakukan berbagai cara untuk menjaga nama baiknya.

Laporan keuangan juga harus Relevance dan faith representation sesuai yang dinyatakan pada *Statement of financial Accounting Concept* No. 8 yaitu dua kualitas yang membuat informasi akuntansi bermanfaat dalam pengambilan keputusan (financial Accounting Standard Board, 2010). Untuk memenuhi dua criteria relevance dan faith

representation, laporan keuangan selain harus sesuai dengan SAK ETAP perlu juga untuk diaudit oleh pihak eksternal yang independen untuk menjaga kredibilitas koperasi.

Menurut Halim (2003) peranan jasa audit dalam perkembangan usaha suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan pengawasan, kredibilitas perusahaan, efisiensi dan kejujuran. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yaitu jasa audit auditor independen. Dengan jasa audit, laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan pihak luar dan dapat dipercaya (Mulyadi, 2009). Hal ini yang membuat audit laporan keuangan menjadi penting untuk dilakukan.

Pelaksanaan jasa audit dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikemukakan oleh Carey (2013) yang menyatakan faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit eksternal yaitu ukuran perusahaan. Jika dikaitkan dengan entitas koperasi, ukuran perusahaan menggunakan ukuran koperasi, seperti penelitian terdahulu dari Alfurkaniati (2004) dan Ardiansah (2011) yang menyebutkan bahwa ukuran koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit. Ukuran koperasi menggunakan dasar total aset koperasi, semakin besar total aset maka semakin besar ukuran koperasi sehingga koperasi memiliki tanggungjawab lebih terhadap anggotanya dan pihak ketiga (pemerintah dan perbankan). Untuk itu koperasi memerlukan jasa audit untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan dimata stakeholder. Untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan menghindari kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh stakeholder maka koperasi terdorong untuk melakukan audit. karena pemberi pinjaman mendasarkan keputusan investasinya pada laporan keuangan yang diaudit.

Faktor lain yang mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit koperasi adalah jumlah anggota. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2006), Utaminingsih (2011), dan Lisa (2013) menyatakan bahwa jumlah anggota koperasi, mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit koperasi. Jumlah anggota koperasi yang semakin besar menandakan koperasi berhasil menarik perhatian masyarakat. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku

ekonomi. Semakin banyak anggota koperasi maka semakin besar tanggung jawab koperasi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan anggotanya. Sehingga untuk menjaga kepercayaan anggotanya dan menghindari konflik maka koperasi melakukan audit pada laporan keuangannya. Sehingga kredibilitas koperasi terjaga dimata anggotanya.

Faktor yang diduga mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit selanjutnya adalah jenis koperasi. Jenis koperasi yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan jenis usaha koperasi, menurut undang-undang koperasi No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dikenal lima jenis koperasi yang dijelaskan oleh Deputi Perkembangan SDM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2010 yaitu 1) Koperasi Produsen, 2) Koperasi Konsumen, 3) Koperasi Simpan Pinjam, 4) Koperasi Pemasaran dan 5) Koperasi Jasa. Di dalam praktek koperasi dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi Karyawan (Kopkar), dan seterusnya.

Tertulis dalam Permen Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 bahwa koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang memiliki volume usaha minimal Rp 2.500.000.000 (2,5 Milyar rupiah) diwajibkan untuk diaudit oleh auditor independen. Sedangkan pada Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 2 tahun 2012, tertulis bahwa seluruh koperasi yang memiliki volume usaha diatas Rp.5000.000.000 (5M) diminta oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan audit. Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk jenis koperasi simpan pinjam diwajibkan melakukan audit jika volume usaha koperasi lebih dari Rp 2.500.000.000 (2,5 Milyar rupiah) sedangkan jenis koperasi yang lain seperti koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa belum diwajibkan, hanya diminta untuk melakukan audit jika volume usahanya lebih dari Rp 5000.000.000 (lima milyar rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 2 tahun 2012. Sehingga peneliti menduga bahwa ada pengaruh antara jenis koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit. Dalam

penelitian ini peneliti hanya membedakan jenis koperasi menjadi dua yaitu jenis koperasi simpan pinjam dan jenis koperasi lainnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kemungkinan ukuran koperasi yang dilihat dari total asset, jumlah anggota dan jenis koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit pada koperasi. Sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel jenis koperasi, sebagai variabel yang kemungkinan mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit pada koperasi.

Setelah melihat penjabaran dari latar belakang, maka penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu :

1. Apakah Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh ukuran koperasi?
2. Apakah Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh jumlah anggota?
3. Apakah Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh jenis koperasi?

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk memberikan bukti empiris kemungkinan ukuran koperasi, jumlah anggota dan jenis koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit pada koperasi. Dan memberikan bukti empiris bahwa

1. Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh ukuran koperasi.
2. Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh jumlah anggota.
3. Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh jenis koperasi.

Landasan Teori

Teori Keagenan

Teori keagenan terfokus pada dua individu yaitu principal dan agen. Principal mendelegasikan *responsibility decision making* kepada agen. Baik principal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. (Raharjo, 2007).

Apabila masalah keagenan terus terjadi maka akan mempengaruhi biaya keagenan yang

semakin membesar dan akan merugikan entitas bisnis. Entitas bisnis penelitian ini adalah koperasi. Untuk mengatasi masalah keagenan dan meminimalkan biaya keagenan maka laporan keuangan perlu diaudit untuk mengetahui kinerja keuangan entitas bisnis yang telah di kelola oleh agen. Laporan keuangan auditan juga digunakan untuk memperoleh informasi akuntansi yang penting bagi pengguna eksternal, karena pengguna eksternal berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya.

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap koperasi dari Dinas Koperasi Jawa Tengah memberikan peringkat tingkat kesehatan koperasi sesuai dengan peraturan menteri No.21/PER/M.KUKM/IV/2015. Dengan adanya pemeringkatan tingkat kesehatan koperasi diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap koperasi itu sendiri. Salah satu syarat adalah aspek badan usaha aktif yang ditunjukkan berjalannya mekanisme manajemen koperasi contohnya audit. Semakin baik peringkat koperasi maka semakin sehat pengelolaan kinerjanya. Sehingga audit laporan keuangan menjadi penting untuk dilakukan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam menginterpretasikan keadaan pengelolaan koperasi. Pada Laporan keuangan bertujuan 1) memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditor untuk dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit. 2) Memberikan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal kekayaan tersebut (siapa pihak yang mempunyai hak atas kekayaan tersebut). 3) Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan

prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (*earning power*). 4) Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. 5) Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pembiayaan perusahaan. 6) Memberikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam meramalkan aliran kas masuk ke perusahaan (Januarti, 2006)

Sesuai konsep *agency theory* adanya hubungan antara dua pihak pada entitas koperasi adalah *principal* (anggota, masyarakat dan pihak eksternal) dan *agent* (pengelola/pengurus). Pemilik mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada pengelola dan masing-masing berusaha memaksimalkan keuntungan. *agency theory* memfokuskan pada bentuk penilaian kinerja dan penghargaan yang akan mendorong bawahan bertindak sesuai tujuan perusahaan. Untuk itu laporan keuangan dipilih sebagai bentuk pertanggung jawaban atas hubungan tersebut.

Pelaksanaan informasi laporan keuangan berasal dari perkembangan para pemakai dalam kebutuhannya untuk pengambilan keputusan ekonomi atau memonitor pelaksanaan usaha di koperasi yang digambarkan melalui informasi laporan keuangan. Alasan yang menentukan Pelaksanaan terhadap laporan keuangan, adalah : 1) Informasi keuangan untuk mengurangi ketidakpastian 2) Tingkat ketidakpastian apa yang dihadapi oleh pembuat keputusan dan keuntungan apa yang diharapkan dari pengurangan itu. 3) Apa peran informasi laporan keuangan itu dalam mengurangi ketidakpastian. 4) Tersedianya sumber informasi yang kompetitif (Januarti, 2006).

Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata *co-operation*. *Co* dapat diartikan sebagai bersama dan *Operation* diartikan sebagai kerja sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, definisi dari arti kata koperasi sendiri adalah: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Selain dipandang sebagai bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, koperasi di Indonesia digunakan sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian yang demokratis. Dilihat dari segi tujuan usaha, menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi di Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut: 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Kebutuhan Audit Koperasi

Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAI, 2011). Secara umum auditing merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan ekonomi perusahaan dan jika ditinjau dari profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dan organisasi. Tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai, menjaga kecukupan pengendalian internal dan menyajikan laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen, bukan auditor (Arens et al, 2013).

Menurut Halim (2003) ada empat alasan yang mendorong adanya Pelaksanaan akan jasa audit atas laporan keuangan yaitu :

1. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik antara manajemen sebagai pembuat laporan dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Sehingga manajemen akan berusaha agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. Dipihak lain, pemakai laporan keuangan mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Para pemakai mengharapkan kepastian dari auditor independen bahwa laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh manajemen bebas dari konflik kepentingan terutama kepentingan manajemen. Audit atas laporan keuangan dibutuhkan bahwa laporan keuangan bersifat netral sehingga tingkat reliabilitasnya dapat ditingkatkan.

2. Konsekuensi

Para pemakai laporan keuangan menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Mereka menginginkan adanya pengungkapan (*disclosure*) yang memadai. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berisi pengungkapan yang diperlukan bagi para pemakai yang berpengetahuan dan mengerti laporan keuangan.

3. Kompleksitas

Dunia bisnis yang selalu berkembang mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan yang semakin kompleks. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tingginya risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Hal ini menyulitkan para pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu mereka mengandalkan laporan auditor independen atas laporan keuangan yang diaudit untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang bersangkutan.

4. Keterbatasan akses (Remoteness)

Pemakai laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Jika para pemakai ingin mengakses data secara langsung, maka mereka akan menghadapi kendala waktu, biaya, ketelitian, dan tenaga. Oleh karena itu mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak ketiga yaitu auditor independen.

Faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi Pelaksanaan Jasa Audit pada Koperasi dan Hipotesis

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang akan diteliti tidak lepas dari konflik kepentingan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah dan telaah teoritis. Variabel tersebut adalah ukuran (size) koperasi, jumlah anggota dan jenis koperasi.

Ukuran Koperasi

Badan Usaha yang semakin berkembang akan cenderung untuk melakukan pemisahan antara pemilik dan pengelola. Hal tersebut berlaku juga untuk koperasi. Teori keagenan menjelaskan bahwa terjadinya konflik keagenan disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan pihak principal (anggota, masyarakat, pihak ketiga) terhadap pengelolaan pengurus sebagai agennya. Beberapa kasus penipuan dan korupsi yang terjadi pada koperasi menambah buruk citra koperasi dimata masyarakat, oleh sebab itu jasa audit diperlukan sebagai solusi dari masalah tersebut. Pelaksanaan jasa audit berbanding lurus dengan ukuran koperasi. Ukuran koperasi dilihat dari total asset koperasi. Apabila total assetnya tinggi dan maka ukuran koperasi dan kemungkinan koperasi meminta jasa audit juga semakin meningkat karena jika ukuran koerasi itu besar maka tanggung jawabnya juga besar untuk mempertahankan kepercayaan publik. Selain itu koperasi ingin menghindari konflik

keagenan yang mungkin akan terjadi untuk meminimalkan biaya keagenan yang mungkin muncul dari konflik keagenan dan menjaga kredibilitas koperasi dimata *stakeholder*. Penelitian mengenai pengaruh ukuran koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit telah banyak dilakukan, beberapa penelitian dilakukan oleh Alfurkaniati (2004) yang menunjukkan variabel ukuran koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit. Pendapat tersebut didukung penelitian dari Ardiansah (2011) dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa ukuran koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$$H_1 = \text{Ukuran Koperasi berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan jasa audit pada koperasi}$$

Jumlah Anggota

Ardiansah (2011) menyatakan bahwa keberhasilan koperasi mencakup tiga hal yaitu *business success* (keberhasilan bidang usaha), *member success* (keberhasilan di bidang anggota) serta *development success* (keberhasilan dibidang pertumbuhan). Keberhasilan dibidang anggota dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota. Jumlah anggota koperasi yang semakin besar menandakan bahwa koperasi tersebut berhasil menarik masyarakat untuk menjadi anggotanya. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Utaminingsih dan Hidayah (2011) dan Lisa (2013) menyatakan bahwa jumlah anggota koperasi, mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit koperasi. Jumlah anggota koperasi yang semakin besar menandakan koperasi berhasil menarik perhatian masyarakat. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Keanggotaan koperasi yang semakin besar ini memicu terjadinya asimetri informasi. Teori keagenan menjelaskan kemungkinan terjadinya asimetri informasi di koperasi karena banyaknya anggota koperasi

yang belum memahami pengelolaan koperasi. Pelaksanaan jasa audit mungkin saja datang dari anggota koperasi yang berawal dari adanya asimetri informasi tersebut. Karena jika asimetri informasi akan menimbulkan konflik keagenan dan memperbesar biaya keagenan sehingga untuk mengatasi asimetri informasi ini salah satu cara adalah dilakukannya audit atas laporan keuangan. Penelitian tentang pengaruh jumlah anggota terhadap Pelaksanaan jasa audit eksternal dilakukan oleh Januarti dan Nasir (2006) yang menemukan bahwa variabel yang signifikan berpengaruh terhadap Pelaksanaan jasa audit adalah jumlah anggota, temuan tersebut didukung juga oleh Utaminingsih dan Hidayah (2011) yang menyatakan jumlah anggota koperasi secara parsial berpengaruh terhadap Pelaksanaan jasa audit, serta penelitian dari Ardiansah (2011) mendukung kedua peneliti sebelumnya yang menyatakan semakin besar jumlah anggota suatu koperasi, semakin tinggi kemungkinan koperasi menggunakan jasa audit eksternal. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_2 =$ Jumlah Anggota berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan jasa audit pada koperasi

Jenis Koperasi

Faktor yang mungkin mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit selanjutnya adalah jenis koperasi. Jenis koperasi yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan jenis usaha koperasi, menurut undang-undang koperasi No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian dikenal lima jenis koperasi yang dijelaskan oleh Deputy Perkembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2010 yaitu 1) Koperasi Produsen, 2) Koperasi Konsumen, 3) Koperasi Simpan Pinjam, 4) Koperasi Pemasaran dan 5) Koperasi Jasa. Pengertian dari masing-masing jenis koperasi adalah :

1) Koperasi Produsen koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan

(*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

- 2) Koperasi Konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.
- 4) Koperasi Pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota

sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepatasian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

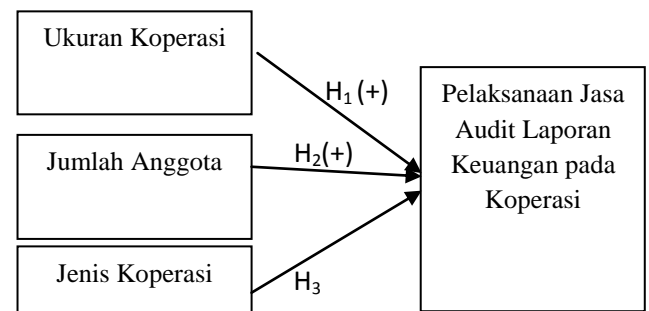
- 5) Koperasi Jasa Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota.

Menurut peraturan Menteri No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 mewajibkan koperasi jenis simpan pinjam mengaudit laporan keuangannya jika volume usaha lebih dari 2,5 milyar. Sedangkan perda no. 2 tahun 2012 untuk semua jenis koperasi di Jawa Tengah diminta mengaudit laporan keuangan jika volume usaha lebih dari 5 milyar (5M). Dilihat dari kedua peraturan tersebut, koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam mendapat perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan jenis koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang paling mudah dijalankan operasionalnya dan paling banyak diminati oleh anggota masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berminat semakin besar tanggung jawab publiknya, sehingga untuk menghindari konflik keagenan dan meminimalkan biaya keagenan yang mungkin muncul koperasi lebih memilih untuk mengaudit laporan keuangannya agar kredibilitas koperasi tetap terjaga dimata masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_3 =$ Jenis Koperasi berpengaruh terhadap Pelaksanaan jasa audit pada koperasi

Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari teori diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis penelitian ini seperti tampak pada gambar 2.1 yang menyebutkan bahwa ukuran koperasi, jumlah anggota berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan jasa audit, dan jenis koperasi berpengaruh terhadap Pelaksanaan jasa audit pada koperasi.



Sumber : Data diolah, 2016

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran teoritis

Metodologi Penelitian

Rancangan penelitian ini merupakan rancangan penelitian kausal. Hal ini karena penelitian ini bermaksud meneliti pengaruh antara variabel-variabel. Penelitian ini merupakan *explanatory research*, karena bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis (Lisa, 2013). Observasi yang digunakan adalah koperasi provinsi yang merupakan binaan langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 yang berjumlah 475 unit koperasi. Pengambilan sampel observasi dalam penelitian ini menggunakan *Area Sampling*. Desain *area sampling* merupakan cluster geografis. Artinya, ketika penelitian berkaitan dengan populasi dalam wilayah geografis yang dapat diidentifikasi seperti kabupaten, blok kota,

atau batas tertentu dalam suatu daerah, area sampling dapat dilakukan. Dengan demikian, area sampling adalah bentuk cluster sampling dalam suatu daerah (Sekaran, 2003). Teknik pengambilan sampel dimulai dengan membagi area di Jawa Tengah menjadi 6 area yaitu eks karesidenan Banyumas, eks karesidenan Kedu, eks karesidenan Pati, eks karesidenan Pekalongan, eks karesidenan Semarang dan eks karesidenan Surakarta. Setelah itu pengambilan observasi per wilayah dilakukan secara random dan didapatkan jumlah observasi 475 unit koperasi. Jumlah observasi digunakan sebagai sampel maka jumlah observasi sama dengan jumlah sampel yaitu 475 unit koperasi. Dari 475 unit koperasi yang memiliki data lengkap dan dapat diproses hanya 270 unit koperasi. Sehingga jumlah sampel terakhir dalam penelitian ini sebanyak 270 unit koperasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Analisis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh seperti rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum
2. Analisis inferensial, merupakan metode analisis yang menggunakan data yang berbentuk angka dan analisis dengan cara membandingkan melalui perhitungan dan mengaplikasikannya dengan menggunakan rumus yang sesuai. Analisis inferensial digunakan untuk menguji parameter populasi yang ada, dengan menggunakan data yang berasal dari koperasi yang diteliti, hal ini untuk mempermudah mengelola data yang berwujud angka statistic dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Audit pada Koperasi

Pelaksanaan audit pada koperasi yang dimaksud penelitian ini yaitu Pelaksanaan badan usaha koperasi terhadap jasa audit laporan keuangan kepada pihak ketiga yang independen. Data variabel Y merupakan Variabel dummy. kriteria koperasi yang sudah melakukan audit memiliki skor 1, sedangkan untuk koperasi yang tidak melakukan audit memiliki skor 0

Ukuran (size) Koperasi

Ukuran koperasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah besar kecilnya koperasi. Besar kecilnya koperasi dapat diukur dengan melihat total asset koperasi. Semakin besar total asset maka ukuran koperasi juga semakin besar, dengan ukuran koperasi yang semakin besar terdapat tanggung jawab yang besar juga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap koperasi sehingga koperasi akan cenderung melakukan audit. Jadi variabel Ukuran koperasi dalam penelitian ini dapat diketahui dari laporan keuangan dengan menggunakan total asset sebagai ukurannya.

Jumlah Anggota

Jumlah anggota yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota koperasi primer tahun 2016. Pada koperasi syarat untuk menjadi anggotanya adalah apabila seseorang telah membayar simpanan pokok. Pada koperasi besarnya simpanan pokok untuk masing-masing anggota adalah sama, hal ini berbeda dengan kepemilikan saham pada perusahaan. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dalam Rapat Anggota Tahunan (Januarti dan Nasir, 2006).

Variabel jumlah anggota dalam penelitian ini dapat diketahui dari laporan pertanggungjawaban RAT koperasi.

Jenis Koperasi

Jenis koperasi yang dimaksudkan pada penelitian ini merupakan jenis koperasi berdasarkan jenis usaha koperasi yang dicantumkan pada nama koperasinya. Dalam penelitian ini variabel jenis koperasi dinyatakan dengan menggunakan variabel dummy untuk variabel jenis koperasi yang

memiliki nama koperasi simpan pinjam diberi label 1 sedangkan koperasi selain simpan pinjam yaitu koperasi produsen, konsumen, pemasaran, dan jasa diberi label 0. Data jenis koperasi dapat diketahui melalui dokumentasi yang diperoleh dari web Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

Analisa Dan Pembahasan

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel ukuran koperasi, jumlah anggota dan jenis koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit koperasi (Y). Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS Versi 20 *For Windows* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig.
Size	0,177	14,892	0,000
Jml Agt	5,275	3,006	0,003
Jen. Kop	-0,15	-3,772	0,000
Konstanta	-3,475		
R	0,739		
R _{square}	0,546		
Sig. F	0,000		
N	270		

Variabel terikat : Pelaksanaan Jasa Audit

*Signifikan secara statistic pada level $\alpha = 5\%$

Hasil perhitungan regresi berganda tersebut dapat diketahui formulasinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -3,475 + 0,177X_1 + 5,275X_2 - 0,15X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta (a) = -3,475 menunjukkan besarnya Pelaksanaan jasa audit jika ukuran koperasi, jumlah anggota, dan

jenis koperasi besarnya 0 maka besarnya Pelaksanaan jasa audit sebesar -3,475.

- Koefisien regresi X_1 (Ukuran Koperasi) sebesar 0,177 (b_1), menunjukkan besarnya pengaruh Ukuran Koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit, regresi bertanda positif menunjukkan ukuran koperasi searah terhadap Pelaksanaan jasa audit (Y), yang berarti setiap peningkatan Ukuran koperasi yang dilihat dari asetnya akan menyebabkan Pelaksanaan jasa audit akan mengalami peningkatan.
- Koefisien regresi X_2 (Jumlah Anggota) sebesar 5,275 (b_2), menunjukkan besarnya pengaruh jumlah anggota terhadap Pelaksanaan jasa audit, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan jumlah anggota berpengaruh searah terhadap Pelaksanaan jasa audit (Y) yang berarti setiap peningkatan jumlah anggota akan menyebabkan peningkatan Pelaksanaan jasa audit.
- Koefisien regresi X_3 (Jenis Koperasi) sebesar -0,15 (b_3), menunjukkan terdapat pengaruh jenis koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit, dengan koefisien regresi bertanda negatif.

Koefisien regresi berganda (R) sebesar 0,739 menunjukkan bahwa secara bersama-sama ukuran koperasi, jumlah anggota dan jenis koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit sebesar 73,9%. Berdasarkan hasil analisa regresi linier berganda diatas diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,546. angka ini menunjukkan bahwa variabel ukuran koperasi, jumlah anggota dan jenis koperasi dapat menjelaskan atau mampu memberikan kontribusi terhadap variabel Pelaksanaan jasa audit sebesar 54,6% sedangkan sisanya 45,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji t. hasil uji t masing-masing variabel disajikan pada table berikut :

Tabel 4.2. Koefisien Regresi masing-masing variabel bebas

Variabel	Koefisien Regresi	Sig. t	Ket
Ukuran Koperasi	0,177	0,000	Signifikan
Jumlah Anggota	5,275	0,003	Signifikan
Jenis Koperasi	-0,15	0,000	Signifikan

*Signifikan secara statistic pada level $\alpha = 5\%$

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Ukuran Koperasi

Hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ jadi H_0 ditolak atau H_1 diterima sehingga variabel ukuran koperasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pelaksanaan jasa audit.

2) Jumlah Anggota

Hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ jadi H_0 ditolak atau H_2 diterima sehingga variabel jumlah anggota berpengaruh positif signifikan terhadap Pelaksanaan jasa audit.

3) Jenis Koperasi

Hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ jadi H_0 ditolak atau H_3 diterima sehingga variabel jenis anggota berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan jasa audit.

Pembahasan

Pembahasan Pengaruh Ukuran koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit

Hasil penelitian ini menerima hipotesis satu karena secara statistik ukuran koperasi yang diukur dengan total aset secara signifikan mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit. Hasil uji sesuai dengan teori dan hipotesis yang dibangun yaitu semakin besar aset koperasi akan semakin tinggi kemungkinan koperasi melakukan audit dan hasil uji ini konsisten

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfurkaniati (2004), Ardiansah (2011), dan Kusumawati (2012). Hal ini disebabkan koperasi-koperasi yang memiliki aset yang besar akan cenderung melakukan pemisahan antara anggota dan pengelola. Pemisahan ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja manajemen sesuai dengan yang diharapkan oleh anggota sebagai pemiliknya. Pada kenyataannya masih terdapat berbagai masalah yang timbul akibat asimetri informasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara anggota sebagai pemilik (principal) dengan manajer (agen).

Teori keagenan menjelaskan bahwa terjadinya konflik keagenan disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan pihak principal (anggota, masyarakat, pihak ketiga) terhadap pengelolaan pengurus sebagai agennya. Apabila terjadi konflik keagenan maka akan menimbulkan biaya agensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi jika ditambah adanya beberapa kasus penipuan dan korupsi yang terjadi pada koperasi menambah buruk citra koperasi dimata masyarakat, oleh sebab itu jasa audit diperlukan sebagai solusi dari masalah tersebut. Karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan audit lebih sedikit daripada biaya keagenan yang muncul karena konflik keagenan. Maka koperasi memutuskan untuk mengaudit laporan keuangannya.

Pembahasan pengaruh jumlah anggota terhadap Pelaksanaan jasa audit

Hasil uji statistik menunjukkan variabel jumlah anggota koperasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan Pelaksanaan jasa audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Januarti dan Nasir (2006), Ardiansah (2011), Utaminingsih dan Hidayah (2011), Kusumawati (2012) dan Lisa (2013). Jumlah anggota secara statistik mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit pada koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota yang banyak maka tanggung jawab publiknya akan semakin tinggi, untuk

menghindari asimetri informasi yang akan menimbulkan konflik keagenan dan biaya keagenan yang tinggi maka koperasi memilih untuk mengaudit laporan keuangannya. Hasil penelitian dari Januarti dan Nasir (2006) menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan jasa audit eksternal. Hasil tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa koperasi yang memiliki anggota banyak maka kebutuhan Pelaksanaan terhadap jasa audit eksternal juga akan tinggi.

Secara rasional anggota koperasi yang merupakan pemilik koperasi terpisah dari pengelola. Dengan adanya pemisahan tersebut maka dibutuhkan alat komunikasi yang dapat menjembatani antara keduanya. Laporan keuangan yang terpercaya dibutuhkan untuk mengurangi konflik antara keduanya. Kenyataan lain bahwa koperasi yang jumlah anggotanya besar sering terjadi perbedaan pendapat dan wawasan sehingga jasa audit oleh pihak independen diharapkan dapat memberikan laporan keuangan yang reliabel. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian Ardiansah (2011), Utaminingsih dan Hidayah (2011). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota berpengaruh terhadap Pelaksanaan jasa audit independen. Pengelolaan koperasi biasanya tidak semata-mata dapat dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu pada umumnya koperasi menunjuk orang diluar anggota sebagai pengelola koperasi. Sehingga pada posisi yang seperti ini timbullah hubungan antara pengelola dan pemilik.

Adanya perbedaan kepentingan dan semakin banyaknya jumlah anggota koperasi akan menimbulkan perbedaan pendapat serta kepentingan antara anggota yang berdeda pula, maka hal ini mendorong untuk dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor independen. Kusumawati (2012) dan Lisa (2013) juga menegaskan bahwa bahwa jumlah anggota mempengaruhi koperasi

melakukan audit pada laporan keuangannya atau tidak. Semakin banyak jumlah anggota koperasi akan semakin tinggi keinginan koperasi tersebut untuk mengaudit laporan keuangannya. Karena mengaudit laporan keuangan menjadi jembatan komunikasi, penyelesaian konflik keagenan dan meminimalkan biaya keagenan yang mungkin muncul. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit pada koperasi.

Pembahasan pengaruh jenis koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit

Kemungkinan pengaruh jenis koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit pada koperasi dapat dilihat pada tabel 4.2. Hasil ini konsisten dengan rasionalitas yang dibangun, yang menyebutkan bahwa jenis koperasi simpan pinjam memiliki kewajiban lebih untuk melakukan audit bila dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya seperti koperasi produsen, konsumen, pemasaran dan jasa. Hal ini bisa terjadi karena jika kita melihat peraturan menteri No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 yang memberikan perhatian khusus pada jenis koperasi simpan pinjam. Dilihat dari peraturan menteri No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 yang mewajibkan koperasi jenis simpan pinjam mengaudit laporan keuangannya jika volume usaha lebih dari 2,5 milyar. Sedangkan perda Jawa Tengah no. 2 tahun 2012 untuk koperasi jenis simpan pinjam dan lainnya di Jawa Tengah diminta mengaudit laporan keuangan jika volume usaha lebih dari 5 milyar (5M).

Dilihat dari kedua peraturan tersebut, koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam mendapat perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan jenis koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang paling mudah dijalankan operasionalnya dan paling banyak diminati oleh anggota masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berminat semakin besar tanggung jawab publiknya, sehingga untuk menghindari konflik keagenan dan

meminimalkan biaya keagenan yang mungkin muncul koperasi lebih memilih untuk mengaudit laporan keuangannya agar kredibilitas koperasi tetap terjaga dimata masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka diambil kesimpulan bahwa hipotesis 1, 2, dan 3 terbukti berpengaruh secara signifikan. Variabel size (ukuran koperasi) ,jumlah anggota dan jenis koperasi berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan jasa audit pada laporan keuangan koperasi Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur penelitian dibidang auditing pada usaha kecil dan menengah serta koperasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagi praktisi di bidang perkoperasian di Jawa Tengah dan sebagai masukan bagi Dinas Koperasi Jawa Tengah dan badan usaha yang bersangkutan dalam membuat kebijakan dan pelayanan koperasi.

Saran

1. Menambah jumlah sampel penelitian
2. Mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap Pelaksanaan jasa audit pada laporan keuangan koperasi.
3. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengukur rasio kinerja keuangan yang lebih rinci misalnya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas.
4. Melakukan penelitian longitudinal lebih lama tahunnya, misalnya 5 tahun terakhir

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alfurkaniati, 2004. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Jasa Audit Akuntan Publik pada Koperasi Perkotaan di Pekanbaru-Riau. *Tesis Tidak Diterbitkan*. Semarang: Universitas Diponegoro

- [2] Arens, A. Alvin, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf. 2013. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta : Salemba Empat
- [3] Ardiansah, M.N. 2011. Pengaruh Karakteristik Koperasi Terhadap Pelaksanaan Jasa Audit Eksternal : Studi Empiris Koperasi di Kota Semarang. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 6 No. 2 Juli 2011. Hal. 71-82
- [4] Carey, and George Tanewski. 2013. "Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Businesses". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol. 12: 2.
- [5] Halim, Abdul. 2003. *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta.
- [7] Januarti, I. dan M. Nasir. 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Audit pada KPRI di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, hal : 175-186
- [8] Kementrian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Jakarta
- [9] Kementrian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Jakarta

- [10] Kusumawati, K.P.S. 2012. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan jasa Audit Eksternal pada Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Semarang Jawa Tengah. *Tesis tidak di terbitkan. Universitas Diponegoro*
- [11] Lisa, O. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Jasa Audit Eksternal pada Koperasi di Jawa Timur. *Jurnal WIGA Vol. 3 No. 1, Maret 2013. ISSN No. 2088-0944*
- [12] Mulyadi. 2009. *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat
- [13] Raharjo, Eko .2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 2 No. 1 2007 :37- 46. ISSN : 1907-6304*
- [14] Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Jakarta: Penerbit Fokus Media.
- [15] Sekaran, Uma . 2003. *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach*, New York-USA: John Wiley and Sons, Inc
- [16] Utaminingsih, N S dan R. Hidayah .2011. Pengaruh Anggota, Volume Usaha dan Likuiditas Koperasi Terhadap Pelaksanaan Jasa Audit. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 3, No. 1, Maret 2011, pp. 51-59. ISSN: 2085-4277*